

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018



Disusun Oleh :

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Penyusunan LKj-IP SKPD Dinas Pendidikan tahun 2018 mengacu kepada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

LKjIP disusun dengan maksud sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan laporan ini meskipun belum maksimal, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi penyusunan LKjIP Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

Sumbang saran untuk perbaikan penyusunan pada tahun-tahun berikutnya sangatlah diharapkan sehingga penyusunan LKjIP tahun berikutnya dapat lebih berkualitas.

Praya,
KERALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. LOMBOK TENGAH



H. SUMUM, S.Pd., S.H., M.Pd
NIP. 196312311987031325

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
I.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	1
I.2 Data Kepegawaian	1
I.3 Permasalahan	6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	7
II.1. Rencana Strategis OPD	7
II.2 Perjanjian Kinerja	10
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	12
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	12
III.2. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2018	13
III.3. Analisis Capaian Kinerja	13
III.4. Evaluasi Pencapaian Tujuan Strategis SKPD	32
III.5. Akuntabilitas Keuangan	33
BAB IV : PENUTUP	37
Lampiran-lampiran	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Perjanjian Kinerja 2018 ditetapkan enam sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis yang ditetapkan. Keenam sasaran strategis tersebut, meliputi : terwujudnya sarana dan prasarana PAUD yang memadai, terwujudnya sarana dan prasarana DIKDAS yang memadai, terwujudnya PTK yang berkualitas, terwujudnya pembelajaran bagi warga buta aksara, terwujudnya lembaga pendidikan kursus yang berkualitas, terwujudnya pendidikan inklusi yang berkualitas.

Hasil evaluasi dan penilaian pencapaian kinerja sasaran, rata-rata capaiannya adalah sebagai berikut: 1).Sasaran terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang memadai rata-rata pencapaiannya adalah 60,72 atau kategori sedang, 2).Sasaran terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memadai, rata-rata pencapaiannya adalah 100,25 atau kategori sangat baik, 3).Sasaran terwujudnya tenaga pendidik dan Kependidikan yang berkualitas rata-rata pencapaiannya adalah 105,99 atau kategori sangat baik, 4).Sasaran Terwujudnya pembelajaran bagi warga buta aksara rata-rata pencapaiannya adalah 59,27 atau kategori kurang, 5).Sasaran terwujudnya lembaga pendidikan dan kursus yang berkualitas rata-rata pencapaiannya adalah 86,48 atau kategori baik, dan 6).Sasaran terwujudnya pendidikan inklusif yang berkualitas rata-rata pencapaiannya adalah 99,87 atau kategori baik.

Sedangkan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan dari Rp. 147.641.782.639,54 pagu dana yang dituangkan ke dalam lima program teknis dan enam program generik serta 51 kegiatan terealisasi sebesar 99,36% atau Rp.146.693.030.224,00

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

- 1). Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan dibidang pendidikan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pendidikan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.2 Data Kepegawaian

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan didukung oleh sumber daya ASN pada jabatan structural dan fungsional. Gambaran kondisi data kepegawaian pada Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Golongan:

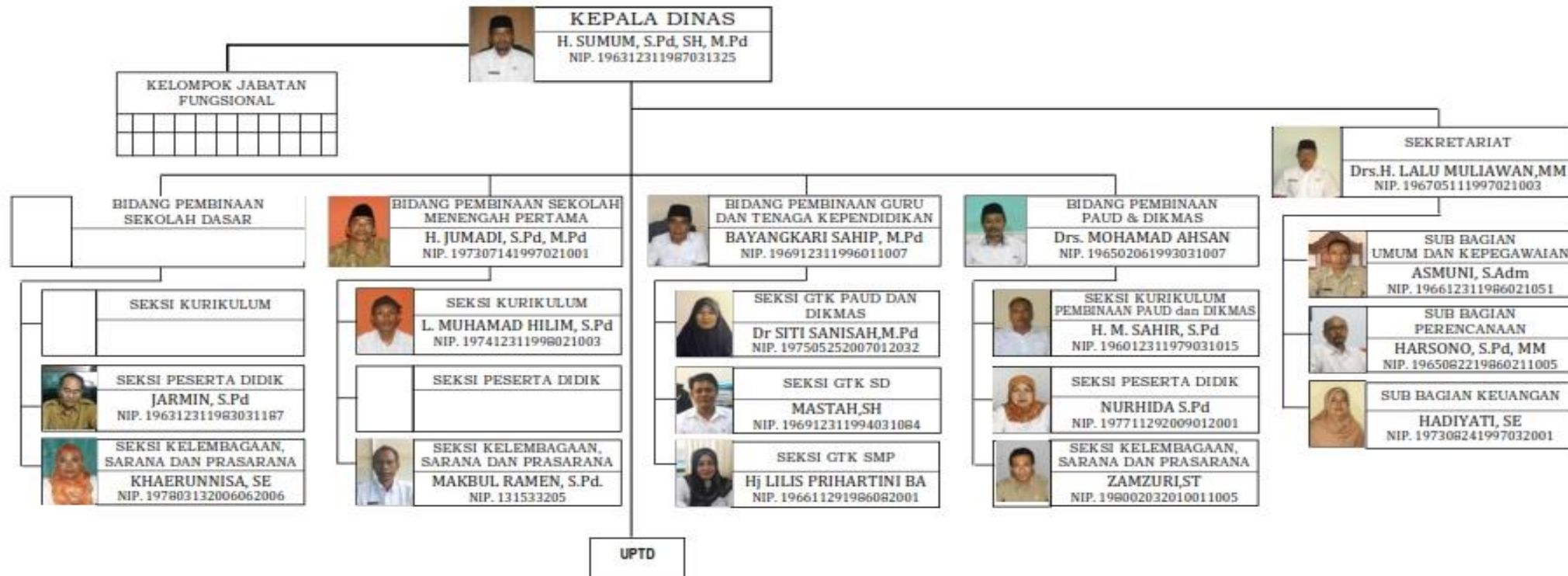
No	Golongan	Jumlah ASN					
		Dinas Pendidikan		UPTD		Pengawas Pendidikan	
		L	P	L	P	L	P
1.	IV/B	2	-	1	-	3	-
2.	IV/A	8	-	9	-	67	10
3.	III/D	6	2	8	1	2	1
4.	III/C	6	4	13	5	-	-
5.	III/B	10	6	16	7	-	-
6.	III/A	4	-	11	3	-	-
7.	II/D	1	1	8	1	-	-
8.	II/C	2	1	8	5	-	-
9.	II/B	3	2	2	-	-	-
10.	II/A	2	1	1	2	-	-
11.	I/D	1	-	-	-	-	-
12.	I/C	-	-	1	-	-	-
	Jumlah	45	17	78	24	72	11

Tabel 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

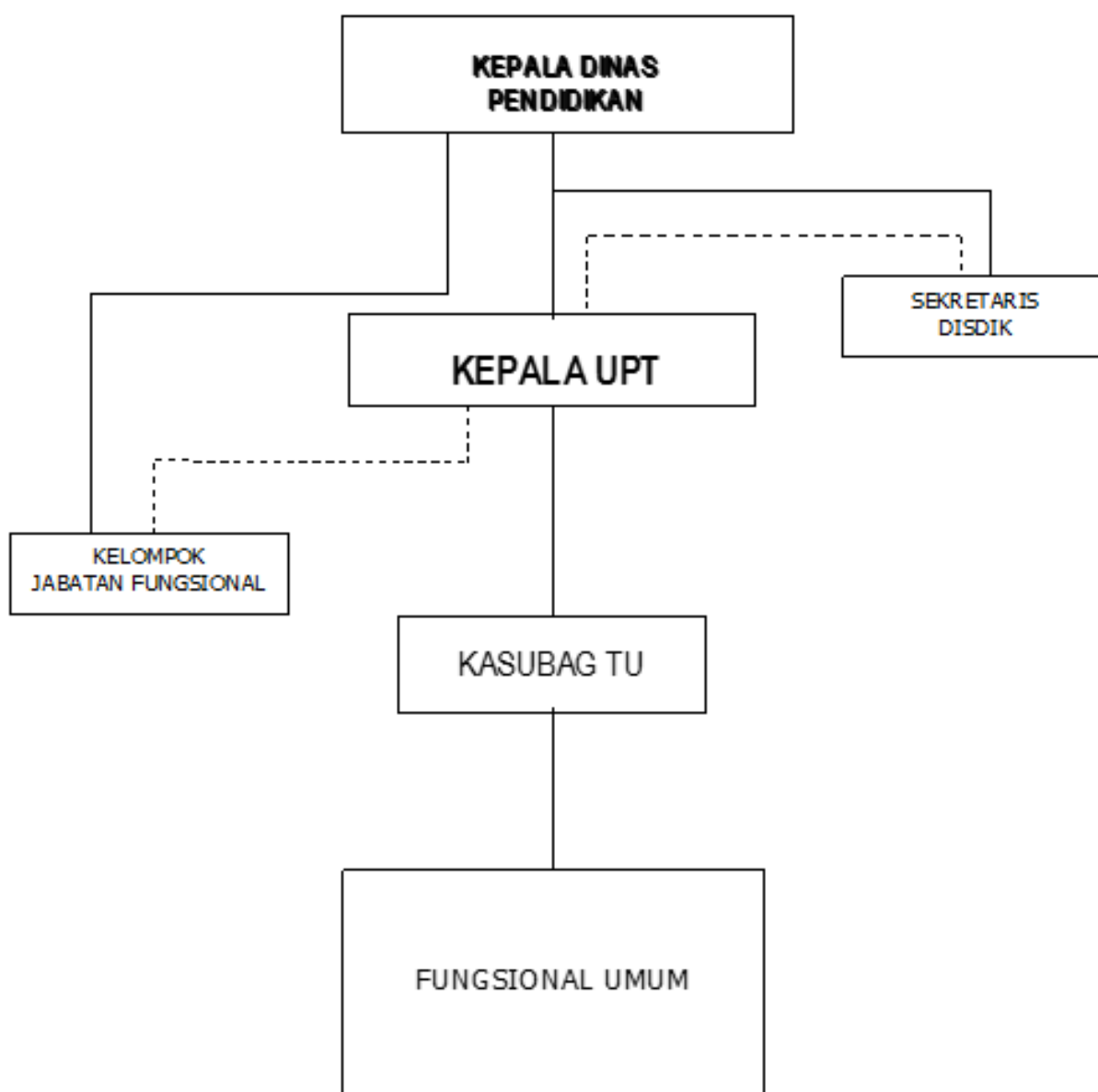
No	Golongan	JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)					
		Dinas Pendidikan		UPTD		Pengawas Pendidikan	
		L	P	L	P	L	P
1.	S3	-	1	-	-		
2.	S2	6	-	-	-	13	3
3.	S1/D4	26	10	45	10	59	8
4.	DIII	2	-	1	-	-	-
5.	DII	-	-	2	1	-	-
6.	SMA Sederajat	8	6	29	13	-	-
7.	SMP Sederajat	2	-	1	-	-	-
8.	SD Sederajat	1	-	-	-	-	-
	JUMLAH	45	17	78	24	72	11

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Tengah
 Nomor : 63 Tahun 2016
 Tanggal : Desember 2016
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah

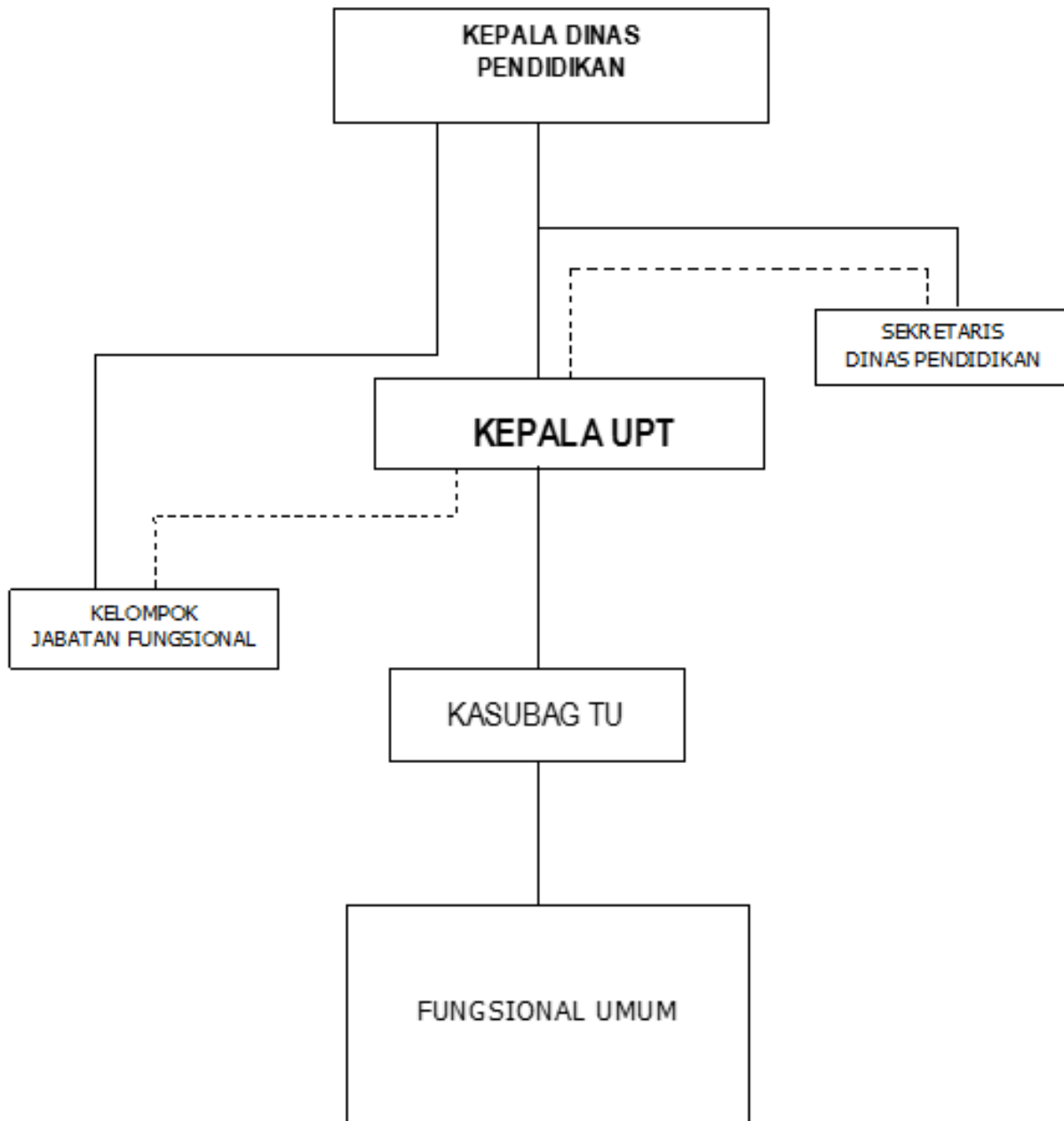
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PAUD dan DIKDAS



STRUKTUR ORGANISASI
UPTD SKB LOMBOK TENGAH



I.3 Permasalahan

Pembangunan pendidikan pada tahun 2018 menunjukkan kemajuan dan keberhasilan yang signifikan. Namun masih terdapat banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2018. Sejumlah permasalahan dalam membangun pendidikan yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah :

1) Belum Semua Penduduk Memperoleh Layanan Akses PAUD yang Berkualitas
Belum semua anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan dengan capaian APK PAUD yang baru sebesar 68,1% pada tahun 2015, belum maksimalnya kualitas pembelajaran, kualitas penyelenggaraan PAUD, rendahnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana. dengan Standardisasi layanan PAUD

2) Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal.

Meskipun capaian APK pendidikan dasar pada tahun 2015 telah di atas 100%. Namun Kualitas pembelajaran dinilai masih belum baik diukur dengan proses pembelajaran ataupun hasil belajar siswa, hal ini ditunjukkan antara lain hasil studi Indonesian National Assessment Program (INAP) Nusa Tenggara Barat tahun 2016. Kemampuan literasi siswa kelas awal berada pada urutan ketujuh dari sepuluh Kabupaten/Kota dengan skor 427, sedangkan kemampuan numerasi berada pada urutan keempat dengan skor 461.

3) Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan
Peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari hasil uji kompetensi guru tahun 2017. Hasil uji kompetensi guru menunjukkan bahwa guru SD di Lombok Tengah berada pada urutan ketujuh dari sepuluh kabupaten/kota yang ada dengan nilai 50,54. Hasil ini di bawah nilai rata-rata provinsi yaitu 50,63 dan di bawah nilai rata-rata nasional sebesar 54,33. Sedangkan hasil uji kompetensi guru SMP di Lombok Tengah berada pada urutan ketujuh dari sepuluh kabupaten/kota yang ada dengan nilai 54,14. Hasil ini di atas rata-rata provinsi yaitu 52,81. dan di bawah rata-rata nasional sebesar 58,25.

4) Pengentasan Buta Aksara belum merata dan maksimal

Sampai dengan tahun 2015 jumlah penduduk penyandang buta aksara di Lombok Tengah mencapai 77.752 orang Tingginya angka buta aksara tersebut, disebabkan karena jumlah penyandang buta aksara tersebar di seluruh kecamatan sehingga penuntasan buta aksara belum merata dan maksimal. Disamping itu penyebab buta aksara yang tinggi juga disebabkan oleh factor ekonomi dan geografis, juga sosial budaya, penyandang buta aksara lebih banyak perempuan di banding laki-laki, rata-rata penyandang buta aksara berusia 45 tahu ke atas, kurang latihan membaca, sehingga warga belajar yang sudah terbebas dari buta aksara kembali menjadi buta aksara, belum tersedia data sasaran berdasarkan nama dan alamat yang jelas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan, bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk periode lima tahun. Menindaklanjuti Undang-undang tersebut, Dinas Pendidikan telah menyusun Renstra Tahun 2016–2021 yang merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan serta sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan telah mendasarkan pelaksanaan program yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

II.1. Rencana Strategis OPD

Dinas Pendidikan sebagai salah satu OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyusun Renstra yang sinkron dan mengacu RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021. Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk mendukung pencapaian program pembangunan khususnya bidang pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah dengan fokus prioritas peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Dengan tersusunnya Renstra 2016-2021, berarti Dinas Pendidikan telah menetapkan perencanaan yang berisi visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Perencanaan strategis Dinas Pendidikan, secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 telah menetapkan komitmen untuk mewujudkan visi Kabupaten Lombok Tengah ke depan, yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu”**

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi

oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu:

- (1) kata 'beriman' berarti masyarakat yang meyakini dan melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- (2) kata 'sejahtera' berarti masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan dan non pangan, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai;
- (3) kata 'bermutu' berarti masyarakat yang memiliki daya saing dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

2. Pernyataan Misi

Misi Dinas Pendidikan merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah dibidang pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah. Rumusan misi Dinas Pendidikan yang merupakan misi kedua Kabupaten Lombok Tengah adalah:

“Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat Dengan Mengedepankan Keadilan Dan Kesetaraan Gender”

Misi kedua menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan terwujudnya sistem pendidikan nasional di Kabupaten Lombok Tengah yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global.

3. Tujuan

Dalam menyelenggarakan misinya, Dinas Pendidikan menetapkan tujuan utama, yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, sasaran strategis yang disusun Dinas Pendidikan untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- (1) Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang memadai
- (2) Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memadai
- (3) Terwujudnya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas
- (4) Terwujudnya pembelajaran bagi warga buta aksara
- (5) Terwujudnya lembaga pendidikan dan kursus yang berkualitas
- (6) Terwujudnya pendidikan inklusi yang berkualitas

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. IKU Dinas Pendidikan merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pendidikan.

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). IKU Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1. Terwujudnya sarana dan prasarana PAUD yang memadai	PAUD Terakreditasi
	APK PAUD
2. Terwujudnya sarana dan prasarana DIKDAS yang memadai	Capaian SPM sarpras DIKDAS
	APK SD/MI/Paket A
	APK SMP/MTs/Paket B
	APM SD/MI/Paket A
3. Terwujudnya PTK yang berkualitas	APM SMP/MTs/Paket B
	Capaian SPM PTK DIKDAS
4. Terwujudnya pembelajaran bagi warga buta aksara	Jumlah penduduk buta huruf (15 tahun ke atas)
	Persentase melek huruf
5. Terwujudnya LPK yang berkualitas	Persentase jumlah daya tampung pendidikan dan kursus
6. Terwujudnya pendidikan inklusi yang berkualitas	Persentase cakupan Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Layanan Pendidikan Inklusi

6. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis, Dinas Pendidikan menetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada program yang ditetapkan dalam RPJMD. Program Dinas Pendidikan merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendidikan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dinas Pendidikan melaksanakan program teknis/utama dan program generik/pendukung. Program teknis/utama merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik/pendukung merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Kedua program tersebut antara lain:

- (1) Program Teknis
 - 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - 3) Program Pendidikan Non Formal
 - 4) Program Pendidikan Luar Biasa
 - 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- (2) Program Generik
 - (1) Program Administrasi Perkantoran
 - (2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - (5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - (6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan secara rinci diuraikan tersendiri dalam lampiran.

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang merupakan bentuk perjanjian dari Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Lombok Tengah kepada Bupati Lombok Tengah pada bulan Januari 2018. Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang memadai	Paud Terakreditasi	%	16,35
		APK PAUD	%	67,62
2.	Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memadai	Capaian SPM sarpras Dikdas	%	75,13
		APK SD/MI/Paket A	%	75,13
		APK SMP/MTs/Paket B	%	111,19
		APM SD/MI/Paket A	%	102,67
3.	Terwujudnya tenaga pendidik dan Kependidikan yang berkualitas	APM SMP/MTs/Paket B	%	99,96
		Capaian SPM PTK DIKDAS	%	75,13
4.	Terwujudnya pembelajaran bagi warga buta aksara	Jumlah penduduk buta huruf (15 tahun ke atas)	Org	35.449
		Persentase angka melek huruf	%	85,78
5.	Terwujudnya lembaga pendidikan dan kursus yang berkualitas	Persentase jumlah daya tampung pendidikan dan kursus	%	52,00
6.	Terwujudnya pendidikan inklusi yang berkualitas	Persentase cakupan Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Layanan Pendidikan Inklusi	%	87,32

PROGRAM

1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pendidikan Anak Usia Dini
6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
7. Program Pendidikan Non-Formal
8. Program Pendidikan Luar Biasa
10. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
11. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

ANGGARAN

Rp.	12.009.471.667,54
Rp.	3.974.405.872
Rp.	70.270.000
Rp.	46.175.000
Rp.	11.374.671.250
Rp.	122.726.482.350
Rp.	1.319.500.000
Rp.	535.460.000
Rp.	4.557.679.000
Rp.	937.667.500
Rp.	147.641.782.639,54

Jumlah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja organisasi tahun 2018 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Pendidikan. Pengukuran dilakukan terhadap capaian kinerja strategis, ibandingkan target dalam rencana strategis dan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2018. Dinas Pendidikan telah merumuskan sasaran strategis dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU). Analisis mendalam dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja IKU. Pengukuran capaian kinerja sasaran kegiatan meliputi identifikasi atas realisasi IKK dan membandingkan dengan targetnya. Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2018 terhadap capaian kinerja Dinas Pendidikan, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis
Tahun 2017 dan 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian 2018	Realisasi 2017
Terwujudnya sarana dan prasarana PAUD yg memadai	PAUD Terakreditasi	%	16,35	3,39	20,71	3,39
	APK PAUD	%	67,62	68,11	100,72	67,72
Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memadai.	% Capaian SPM Sarpras Dikdas	%	75,13	77,17	102,72	76,27
	APK SD/MI/Paket A	%	111,19	109,20	98,21	116,81
	APK SMP/MTs/Paket B	%	102,67	106,96	104,18	102,69
	APM SD/MI/Paket A	%	99,96	99,98	100,02	99,97
Terwujudnya PTK yang berkualitas	APM SMP/MTs/Paket	%	96,30	98,31	102,09	96,42
	% Capaian SPM PTK Dikdas	%	75,13	79,63	105,99	78,31
Terwujudnya pembelajaran bagi warga buta aksara	Jumlah penduduk buta aksara	Org	35,449	5.100	14,39	3.900
	Persentase melek huruf	%	85,78	89,34	104,15	80,94

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian 2018	Realisasi 2017
Terwujudnya LPK yang berkualitas	Persentase jumlah daya tampung pendidikan dan kursus	%	52,00	44,97	84,21	43,27
Terwujudnya pendidikan inklusi yang berkualitas	Persentase cakupan Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Layanan Pendidikan Inklusi	%	77,29	87,21	112,83	85,77

III.2 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2018

Perhitungan pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tk Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Rencana Tk Pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penilaian Capaian Kinerja

NO	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Nilai ≥ 100	Sangat Baik
2.	Nilai 86 s/d 100	Baik
3.	Nilai 71 s/d < 85	Sedang
4.	Nilai 56 s/d < 70	Kurang
5.	Nilai < 55	Sangat Kurang

III.3 Analisis Capaian Kinerja

Untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian masing-masing sasaran strategis dilakukan beberapa analisis antara lain: 1). analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018, 2). analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan beberapa tahun terakhir, 3). analisis perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, 4). analisis dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional, 5). analisis penyebab keberhasilan/

kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, 6).analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, 7).analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

1. Analisis Capaian sasaran strategis terwujudnya sarana dan prasarana PAUD yg memadai

Sasaran strategis terwujudnya sarana dan prasarana PAUD yg memadai, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan Pendidikan anak usia dini. Ketercapaian sasaran strategis terwujudnya sarana dan prasarana PAUD yg memadai diukur dengan indicator Persentase Lembaga PAUD terakreditasi dan Angka Partisipasi Kasar PAUD.

1.1. Analisis/perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018

Akreditasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya. Serta untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah tersebut telah diakreditasi dan menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar akreditasi nasional. Pada tahun 2018 PAUD terakreditasi ditargetkan 16,35% dan terealisasi 3,39% atau 20,71% dari target yang ditetapkan.

Indikator kinerja berikutnya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan capaian indikator kinerja APK PAUD tahun 2018 adalah 68,11% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 67,62%.

1.2. Analisis/Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017

Dibandingkan dengan tahun 2017 realisasi tahun 2018 untuk indikator PAUD terakreditasi tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 hasil akreditasi sampai laporan ini disusun belum ada penetapan dari BAN PAUD dan PNF sehingga belum bisa dilakukan analisa secara menyeluruh. Sedangkan untuk indikator kinerja APK PAUD, dibandingkan tahun 2017 realisasi

tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,39% dari 67,72% menjadi 68,11%.

1.3. Analisis/Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Renstra

Jika dibandingkan dengan target renstra, realisasi capaian indikator kinerja PAUD terakreditasi tahun 2018 belum memenuhi target yang ditetapkan di dalam renstra sebesar 16,35%. Sedangkan indikator kinerja APK PAUD telah melampaui dari target yang ditetapkan dalam renstra sebesar 67,62.

1.4. Analisis/Perbandingan Antara Realisasi Tahun 2018 dengan Standar Nasional

Untuk indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya sarana-prasarana PAUD yang memadai dengan indikator kinerja PAUD terakreditasi belum ada standar secara nasional. Tetapi idialnya semua satuan Pendidikan harus terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN PAUD dan PNF). Demikian pula halnya dengan indikator angka partisipasi kasar, idialnya pencapaian untuk indikator ini adalah 100%. Jika masih belum mencapai 100% berarti masih ada anak usia sekolah yang belum terlayani di satuan pendidikan tertentu, sebaliknya jika angka partisipasi kasar lebih dari 100% dapat diasumsikan bahwa terdapat anak diluar usia sekolah atau terdapat anak yang tinggal kelas.

1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Indikator sasaran strategis tersedianya sarana dan prasarana PAUD yg memadai, yaitu indikator PAUD terakreditasi belum mencapai target yang ditetapkan. Ketidaktercapaian target tersebut disebabkan karena dari 843 lembaga PAUD (330 TK, 489 KB, 1 TPA, 23 SPS) sebagian besar dikelola oleh masyarakat dan hanya 8 TK yang berstatus negeri, Sehingga dapat dipahami bahwa besarnya jumlah lembaga masih terbatas pada penyediaan akses bagi penduduk usia 3-6 Tahun. Sedangkan dari sisi manajemen penyelenggaraan dan pengembangan PAUD belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Faktor penyebab ketidaktercapaian indikator PAUD Terakreditasi lainnya adalah karena adanya peralihan kewenangan lembaga pelaksana Akreditasi dari BAN-SM ke BAN PAUD dan PNF, disamping terbatasnya jumlah kuota lembaga PAUD yang akan diakreditasi dari BAN PAUD dan PNF.

1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Berbagai ikhtiar telah dilakukan dalam upaya pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan diantaranya penyediaan dana bagi penyelenggaraan dan pengembangan PAUD di Lombok Tengah. Berdasar DPA 2018 untuk pencapaian sasaran strategis melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini pagu dana yang tersedia sebesar Rp. 11.374.671.250,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.246.005.050,00 atau 98,87% dari pagu anggaran. Dana tersebut dianggarkan untuk BOP bagi 843 lembaga PAUD, pelatihan berjenjang bagi guru PAUD, pelatihan K13, penyediaan APE, Honor bagi 1000 orang guru PAUD.

1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya sarana dan prasarana PAUD yg memadai dengan indicator PAUD Terakreditasi dilaksanakan melalui satu program teknis/utama yaitu Program Pendidikan Anak Usia Dini dan satu program generik/penunjang yaitu Program Pendidikan Non Formal.

2. Analisis Capaian sasaran strategis terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memadai.

Sasaran strategis terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memadai dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan Pendidikan Dasar khususnya SD dan SMP melalui pemenuhan SPM Pendidikan Dasar sesuai Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, terutama layanan sarana dan prasarana oleh Pemerintah

Ketercapaian sasaran strategis terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memadai diukur dengan indicator:

1. Capaian SPM Sarpras Dikdas
2. APK SD/MI/Paket A
3. APK SMP/MTs/Paket B
4. APM SD/MI/Paket A
5. APM SMP/MTs/Paket B

Untuk memberi gambaran tingkat pencapaian dari masing-masing indikator di atas akan diuraikan secara rinci sebagai berikut:

2.1 Indikator Kinerja Capaian SPM Sarpras Dikdas

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini mengacu kepada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, terutama layanan sarana dan prasarana oleh Pemerintah, yang meliputi:

- 1). Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
- 2). Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
- 3). Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
- 4). Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;

2.1.1 Analisis Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pada tahun 2018 indikator kinerja sasaran capaian SPM Sarpras Dikdas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pencapaiannya adalah 77,17%. Pencapaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 75,13% atau 102,72% dari target. Meskipun target yang ditetapkan terpecah tetapi masih terdapat 22,83% SD/MI dan SMP/MTs yang belum memenuhi SPM, hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dan kajian untuk menentukan langkah-langkah pemenuhan selanjutnya.

2.1.2 Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan Beberapa Tahun Terakhir

Dibandingkan dengan tahun 2017 realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2017 realisasinya sebesar 76,27% dari target sebesar 75,01%, maka pada tahun 2018 meningkat 0,90% menjadi 77,17% dari target yang ditetapkan sebesar 75,13%.

2.1.3 Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2018 dengan Target Renstra

Jika dibandingkan dengan target Renstra, realisasi capaian indikator kinerja capaian SPM sarpras dikdas tahun 2018 telah melampaui target yang ditetapkan. Di dalam renstra indikator kinerja sasaran strategis ini ditargetkan sebesar 75,13%. Meskipun realisasinya melampaui target, tetapi masih perlu mendapatkan perhatian karena masih terdapat 22,83% SD/MI dan SMP/MTs yang belum terpenuhi sarana prasarannya sesuai SPM.

2.1.4 Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional.

Secara nasional belum ada standar yang baku, tetapi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, SPM Pendidikan Dasar harus sudah terpenuhi seluruhnya pada tahun 2014.

2.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Meskipun pada tahun 2018 target yang ditetapkan telah terlampaui, tetapi hal ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Karena sesuai dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 440 Tahun 2014 tentang Penetapan Target Pencapaian Indikator Kinerja Tahunan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Lombok Tengah ditargetkan pada tahun 2014 SPM Pendidikan Dasar telah terpenuhi 100%.

Salah satu factor pendukung keberhasilan pencapaian target pada tahun 2018 adalah, meskipun dengan kemampuan fiscal yang terbatas tetapi Pemerintah mempunyai komitmen yang kuat dalam ikhtiarnya untuk mencapai SPM Pendidikan Dasar.

Sedangkan factor penghambat yang menyebabkan belum 100% terpenuhi SPM Pendidikan Dasar ini adalah Ikhtiar pencapaian SPM Pendidikan Dasar masih sangat bergantung kepada Pemerintah, belum ada kontribusi nyata dari masyarakat khususnya dunia usaha dan dunia industry disamping karena jumlah SD/MI dan SMP/MTs yang mencapai 1.237 lembaga sehingga menambah sulitnya pemenuhan SPM Pendidikan Dasar.

2.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai target indikator pemerintah daerah melalui Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun telah berupaya dengan maksimal untuk dapat memenuhi target pemenuhan SPM Pendidikan Dasar. Dengan banyaknya jumlah SD dan SMP serta keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah maka sasaran strategis terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memadai belum terpenuhi seratus persen. Sesuai dengan DPA 2018 untuk mencapai sasaran ini tersedia anggaran sebesar Rp. 32.177.682.350,00 dan sesuai laporan realisasi fisik dan keuangan terealisasi sebesar Rp. 31.952.410.315,00 atau 99,30%.

2.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis ini didukung satu program teknis/utama yaitu Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun dan satu program generik/penunjang yaitu, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Sedangkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain:

- 1) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI
- 2) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/MI
- 3) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP/MTs
- 4) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP/MTs

2.2 Indikator Kinerja APK SD/MI dan SMP/MTs

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

2.2.1 Analisis Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pada tahun 2018 realisasi pencapaian indikator kinerja APK SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs adalah 109,20% dan 106,96%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan maka pencapaian indikator kinerja APK SD/MI/Paket A lebih rendah daripada target yang ditetapkan sebesar 111,19%. Meskipun realisasi pencapaiannya lebih rendah 1,99% dari target tetapi Nilai APK SD/MI/Paket A mencapai angka lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa populasi siswa

yang bersekolah pada jenjang SD/MI/Paket A bukan hanya anak usia 7-12 tahun, tetapi mencakup anak berusia di luar usia 7-12 tahun. Adanya siswa dengan usia di luar usia standar di jenjang SD/MI/Paket A menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Untuk indikator kinerja APK SMP/MTs/Paket B pada tahun 2018 terealisasi 106,96% lebih tinggi 4,29% dari target yang ditetapkan sebesar 102,67%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 6,96% anak usia 13-15 tahun yang telah/masih berada di jenjang SMP. Adanya siswa dengan usia di luar usia 13-15 tahun yang masih berada di jenjang SMP menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar SMP/MTs/Paket B yang telah ada di jenjang SMP menunjukkan bahwa siswa tersebut telah masuk sekolah di bawah usia 13-15 tahun.

2.2.2 Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan Beberapa Tahun Terakhir

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, realisasi APK SD/MI/Paket A pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 7,61%. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya jumlah siswa usia di luar usia sekolah dasar dan berkurangnya jumlah siswa tinggal kelas. Sebaliknya dengan realisasi APK SMP/MTs/Paket B. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, realisasi APK SMP/MTs/Paket B tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4,27%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 4,27% siswa usia di luar usia 13-15 tahun.

2.2.3 Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2018 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Dalam rencana strategis Dinas Pendidikan tahun 2016-2021 kedua indikator ini yaitu APK SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B ditargetkan menurun sehingga kondisi kinerja pada akhir periode Renstra adalah 100%. Artinya pada tahun 2021 seluruh siswa SD/MI dan SMP/MTs adalah siswa yang berusia 7-12 tahun dan 13-15 tahun.

2.2.4 Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional

Secara nasional, norma/standar idial untuk APK SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B adalah 100%. Hal ini berarti bahwa siswa yang bersekolah pada jenjang SD adalah siswa usia 7-12 tahun dan siswa usia 13-15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP.

2.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan; Faktor utama penyebab ketidaktercapaian indikator kinerja sasaran strategis APK SD/MI/Paket A adalah semakin menurunnya siswa tinggal sekolah dan menurunnya siswa usia diluar usia 7-12 tahun.

2.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;

Berdasar DPA 2018 untuk pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini dilaksanakan melalui program teknis/utama yaitu Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan pagu dana yang tersedia sebesar Rp. 32.177.682.350,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.952.410.315,00 atau 99,82%. Dana tersebut dianggarkan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana- prasarana, penyediaan alat peraga dan praktik siswa dan alat penunjang lainnya.

2.2.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja)

Program teknis/utama untuk pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sedangkan program generik yang dapat menunjang tercapainya indikator kinerja sasaran strategis ini adalah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

2.3 Indikator Kinerja APM SD/MI dan SMP/MTs

APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100%. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai.

2.3.1 Analisis Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tingkat pencapaian APM SD/MI/Paket A Tahun 2018 sebesar 99,98% atau 100,02% dari target yang ditetapkan sebesar 99,96%. Peningkatan tersebut berkorelasi dengan menurunnya angka APK

SD/MI/Paket A. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya jumlah siswa usia di luar usia sekolah dasar dan berkurangnya jumlah siswa tinggal kelas. Sedangkan capaian APM SMP/MTs/Paket B pada tahun 2018 adalah sebesar 98,31% atau 102,09% dari target yang ditetapkan sebesar 96,30%

2.3.2 Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, realisasi APM SD/MI/Paket A pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,10%. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya jumlah siswa usia di luar usia sekolah dasar dan berkurangnya jumlah siswa tinggal kelas. Sedangkan untuk APM SMP/MTs/Paket B pencapaian tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,89% dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 96,42%.

2.3.3 Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2018 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dalam rencana strategis Dinas Pendidikan tahun 2016-2021 kedua indikator ini yaitu APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B ditargetkan pada akhir periode Renstra adalah 100%. Artinya pada tahun 2021 tidak ada lagi siswa di luar usia SD dan SMP yang masih berada di satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Demikian halnya siswa tinggal kelas pada tahun 2021 atau pada akhir periode renstra ditargetkan 0%.

2.3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional

Dibanding dengan standar nasional bahwa APM idialnya adalah 100%. Dari data yang ada capaian APM SD/MI dan SMP/MTs Lombok Tengah secara umum telah menunjukkan hasil sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Meskipun capaian APM baik SD/MI maupun SMP/MTs belum mencapai standar idial nasional yaitu 100%

2.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja APK adalah, kemudahan akses bagi penduduk usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sesuai jenjang usianya. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah SD/MI dan SMP/MTs di Lombok Tengah. Sampai dengan akhir tahun 2018 berdasar data dapodik

(<http://referensi.data.kemdikbud.go.id>) jumlah SD/MI adalah 898 lembaga dan SMP/MTs sebanyak 450 lembaga sedangkan jumlah siswa SD/MI sebanyak 90.355 orang dan siswa SMP/MTs sebanyak 24.595 orang siswa, hal ini menunjukkan bahwa dari sisi akses penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTs telah terpenuhi.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan APM ini adalah dengan regulasi tentang persyaratan minimal untuk masuk SD/MI dan SMP/MTs.

2.3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan pencapaian indikator APM SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B yang telah memenuhi target, hal ini berkorelasi dengan besarnya dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Pagu dana untuk kegiatan pembangunan pendidikan melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 122.726.482.350,00

2.3.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program dan kegiatan teknis dan generik yang baik secara langsung maupun tidak langsung menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Keterangan
I	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Utama
1.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI	Kegiatan Utama
2.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/MI	Kegiatan Utama
3.	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Kegiatan Utama
4.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP/MTs	Kegiatan Utama
5.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP/MTs	Kegiatan Utama
6.	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah SMP/MTs	Kegiatan Utama
7.	Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Dasar SMP/MTs	Kegiatan Utama
8.	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI	Kegiatan Utama
9.	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs	Kegiatan Utama
10.	Pelatihan Penyusunan kurikulum SD/MI	Kegiatan Pendukung
11.	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SD/MI	Kegiatan Pendukung
12.	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI	Kegiatan Pendukung
13.	Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Dasar SD/MI	Kegiatan Pendukung
14.	Pelatihan Penyusunan kurikulum SMP/MTs	Kegiatan Pendukung

No	Program/Kegiatan	Keterangan
15.	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS di Satuan Pendidikan Dasar SMP/MTs	Kegiatan Pendukung
16.	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP/MTs	Kegiatan Pendukung
17.	Pembinaan Pendidikan Karakter dan Siswa Berprestasi SMP/MTs	Kegiatan Pendukung

3. Capaian sasaran strategis terwujudnya PTK yang berkualitas

Sasaran strategis terwujudnya PTK yang berkualitas diukur dengan indikator persentase capaian SPM PTK DIKDAS

Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal khusus jenis layanan pendidik dan tenaga kependidikan. Salah satu manfaat dari SPM adalah menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar khususnya layanan pendidik dan tenaga kependidikan sehingga SPM dapat menjadi dasar menentukan kebutuhan pembiayaan daerah.

Seperti halnya sasaran strategis terwujudnya sarana-prasarana pendidikan dasar yang memadai, sasaran terwujudnya PTK yang berkualitas, untuk mengukur pencapaian indikator ini digunakan indikator standar pelayanan minimal pendidikan dasar sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota, khususnya layanan pendidik dan tenaga kependidikan, yang meliputi :

1. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
2. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
3. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
4. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
5. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%

6. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan;
 7. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
 8. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 9. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- 3.1 Analisis Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
- Dalam penetapan kinerja tahun 2018 sasaran strategis terwujudnya PTK Dikdas yang berkualitas dengan indikator persentase capaian SPM PTK Dikdas ditargetkan sebesar 75,13%. Dari perhitungan yang dilakukan terhadap sembilan sub indikator ini rata-rata pencapaiannya adalah 79,63% atau 105,99% dari target. Meskipun rata-rata pencapaian indikator ini melampaui target yang ditetapkan tetapi masih terdapat 20,37% satuan pendidikan yang belum memenuhi sembilan sub indikator ini.
- 3.2 Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan Beberapa Tahun Terakhir
- Dalam beberapa tahun terakhir ini capaian sasaran strategis terwujudnya PTK Dikdas yang berkualitas dengan indikator persentase capaian SPM PTK Dikdas menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun peningkatan tersebut tidak terlalu besar. Capaian indikator pada tahun 2017 mencapai 78,30% meningkat 1,33% menjadi 79,63% pada tahun 2018.
- 3.3 Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2018 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
- Dalam rencana strategis Dinas Pendidikan tahun 2016-2021 sasaran strategis terwujudnya PTK Dikdas yang berkualitas dengan indikator persentase capaian SPM PTK Dikdas ditargetkan 75,13%. Dengan berbagai intervensi kebijakan, seperti pengangkatan guru tidak tetap sebanyak 2.867 orang guna memenuhi kekurangan guru terutama guru kelas maka target tersebut dapat dicapai meskipun masih banyak satuan pendidikan terutama SD yang masih kekurangan guru kelas terutama guru yang berstatus PNS.
- 3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional
- Jika mengacu kepada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun

2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota pada tahun 2014 SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota wajib terpenuhi.

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Tercapainya target indikator sasaran strategis ini adalah didukung oleh kebijakan Pemda melalui instruksi kepada Kepala Dinas Pendidikan, bahwa setiap satuan pendidikan terutama SD harus tersedia minimal 4 (empat) orang guru PNS serta adanya pengangkatan guru honorer untuk memenuhi kekurangan guru terutama guru kelas.

3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran strategis ini tersedia anggaran sebesar Rp. 4.557.679.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.499.257.100,00 (98,72%) terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.58.421.900.

3.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja).

Program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Keterangan
I	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Utama
1.	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Kegiatan Utama
2.	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Kegiatan Utama
3.	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Kegiatan Utama
4.	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan Utama
5.	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Kegiatan Utama
6.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kegiatan Utama
7.	Pengembangan kualitas literasi dan numerasi guru	Kegiatan Utama
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Pendukung
1	Penilaian Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat PNS Guru	Kegiatan Pendukung
III	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Kegiatan Pendukung
1	Pelaksanaan Tugas Pengawasan Akademik dan Manajerial pada Satuan Pendidikan	Kegiatan Pendukung

4. **Capaian sasaran strategis terwujudnya pembelajaran bagi warga buta aksara**

Indikator sasaran strategis terwujudnya pembelajaran bagi warga buta aksara adalah jumlah penduduk buta aksara dan persentase angka melek huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa

harus mengerti apa yang di baca/ditulisnyaterhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan Angka Buta Huruf (ABH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Lombok Tengah masih tercatat sebagai Kabupaten yang memiliki angka buta huruf tertinggi, sampai dengan akhir tahun 2018 jumlah penduduk penyandang buta aksara mencapai 64.932 orang.

4.1 Analisis Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sasaran strategis terwujudnya pembelajaran bagi warga buta aksara dengan indikator jumlah penduduk buta aksara ditargetkan bahwa dari 70.032 orang buta aksara pada tahun 2018 harus dibelajarkan sebanyak 35.449 orang, sehingga pada akhir tahun 2018 jumlah penduduk buta aksara tersisa 34.583 orang, namun yang mampu dibelajarkan hanya 5.100 orang atau 14,39% dari target. Sedangkan indikator berikutnya yaitu persentase melek huruf ditargetkan 85,78% dan terealisasi 89,34% atau 104,15% dari terget yang ditetapkan.

4.2 Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2017 jumlah penduduk buta aksara mencapai 70.032 orang menurun menjadi 64.932 pada tahun 2018. Artinya selama tahun 2018 dari 70.031 orang penyandang buta aksara hanya mampu dituntaskan sebanyak 5.100 orang meningkat dibanding tahun 2017 yang hanya 3.900 orang. Sedangkan persentase melek huruf pada tahun 2018 meningkat 9,60% dibanding tahun 2017.

4.3 Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2018 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2016-2021 sasaran strategis terwujudnya pembelajaran bagi warga buta aksara dengan indikator jumlah penduduk buta aksara ditargetkan 35.449 orang untuk dibelajarkan namun hanya 5.100 orang yang dibelajarkan atau 14,39% dari target dalam renstra, sedangkan indikator kinerja persentase angka melek huruf dalam renstra ditargetkan sebesar 85,78% dan terealisasi 89,34% atau 104,15% dari target. Jika mengacu kepada renstra Kemdikbud RI Tahun 2015-2019 capaian indikator kinerja sasaran strategis masih dibawah target renstra Kemdikbud RI yaitu tahun 2018 yaitu sebesar 96,59%.

4.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional

Secara nasional belum ada standar nasional yang digunakan namun jika mengacu kepada target renstra Kemdikbud RI tahun 2015-2019 maka capaian

indikator ini idialnya harus sama dengan target rensyra Kemdikbud yaitu 96,59%.

4.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Masih rendahnya tingkat pencapaian indikator ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah. Beberapa langkah solusi telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain bekerjasama dengan perguruan tinggi (IKIP Mataram) melalui KKN Holistik Integratif serta penyusunan regulasi tentang gerakan penuntasan buta aksara.

4.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai target indikator kinerja sasaran strategis ini, Pemerintah Kabupaten melalui Program Pendidikan Non Formal menyediakan anggaran sebesar Rp. 1.319.500.000,00 dan terealisasi 1.316.714.408,00 atau 99,79% dari pagu yang disediakan.

4.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dari 5 (lima) program teknis/utama dan 6 (enam) program generik/penunjang hanya program Pendidikan Non Formal (PNF) yang secara langsung menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya pembelajaran bagi warga buta aksara.

5. **Capaian sasaran strategis terwujudnya lembaga pendidikan dan kursus yang berkualitas**

Peningkatan kualitas lembaga penyelenggara pelatihan dan kursus bertujuan untuk menjamin kualitas peserta pelatihan dan kursus sehingga dapat diterima oleh pasar kerja atau termotivasi untuk menjadi pengusaha. Berdasar data (<https://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id>) jumlah lembaga kursus dan pelatihan pada tahun 2018 mencapai 69 lembaga yang tersebar di seluruh kecamatan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mendorong proses akreditasi dan penyelarasan penyelenggara/ lembaga kursus dan pelatihan agar mengacu pada standar penyelenggaraan serta mengadaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai landasan dalam menyusun kerangka materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Peningkatan mutu penyelenggara kursus berdampak positif terhadap meningkatnya jumlah peserta didik dan mutu lulusan. Jumlah peserta didik kursus dan pelatihan pada tahun 2018 berdasar data pada (<https://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id>) telah mencapai 997 orang, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 742 orang.

- 5.1 Analisis Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Sesuai dengan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Pendidikan dengan Bupati Lombok Tengah sasaran strategis terwujudnya lembaga pendidikan dan kursus yang berkualitas dengan indikator pesentase daya tampung lembaga pendidikan dan kursus (LPK) ditargetkan 52%. Dengan jumlah lembaga kursus yang mencapai 69 lembaga dengan peserta didik sebanyak 997 orang. Pada tahun 2018 dari indikator kinerja pesentase daya tampung lembaga pendidikan dan kursus (LPK) ditargetkan sebesar 52% dan terealisasi sebesar 43,27% atau 83,21% dari target.
- 5.2 Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan Beberapa Tahun Terakhir
Dibanding tahun 2017, capaian tahun 2018 indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya lembaga pendidikan dan kursus yang berkualitas mengalami peningkatan 1,7% dari 43,27% menjadi 44,97%.
- 5.3 Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2018 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
Indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya lembaga pendidikan dan kursus yang berkualitas dalam rencana strategis tahun 2016-2021 ditargetkan 52% dari jumlah daya tampung yang ada mampu terpenuhi, namun hanya terealisasi 44,97%.
- 5.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional
Belum ada standar baku/standar nasional untuk indikator kinerja ini sehingga untuk membandingkan realisasi dan standar belum dapat dilakukan.
- 5.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan
Beberapa faktor penyebab ketidaktercapaian target indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya lembaga pendidikan dan kursus yang berkualitas pada tahun 2018 adalah bahwa dari 69 LKP tidak seluruhnya menyelenggarakan proses pembelajaran secara terus menerus, sebagian besar lembaga kursus ini kegiatannya diselenggarakan secara berkala dan semakin berkurangnya jumlah peserta didik yang terdaftar.
- 5.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Untuk mencapai target indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya lembaga pendidikan dan kursus yang berkualitas melalui program dan kegiatan yang dijabarkan ke dalam DPA tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.319.500.000,00 dan terealisasi Rp.1.316.714.408,00 atau 99,79% dari anggaran yang tersedia.

5.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja)

Dari ke-5 program teknis yang ada, yaitu 1).Program Pendidikan Anak Usia Dini, 2).Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 3).Program Pendidikan Non Formal, 4). Program Pendidikan Luar Biasa, 5). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pendidikan Luar Biasa (PLB) adalah program teknis yang secara langsung menunjang keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis ini, program teknis yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Pendidikan Non Formal dengan kegiatan pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

6. **Capaian sasaran strategis terwujudnya pendidikan inklusif yang berkualitas**

Pada prinsipnya setiap anak usia sekolah berhak dan wajib mengikuti pendidikan yang bermutu. Namun demikian, anak berkebutuhan khusus memiliki beberapa kendala dalam mengikuti pendidikan antara lain sifat disabilitasnya dan yang tak kalah pentingnya adalah penerima masyarakat terhadap kondisinya. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu bergabung dengan anak-anak pada umumnya di sekolah reguler yang disebut dengan pendidikan inklusif, atau mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa. Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi pemberian akses pendidikan kepada semua anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan bersama-sama anak yang lain. Inklusi merupakan suatu sistem yang menempatkan semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, masyarakat dan pembina pendidikan, secara bersama-sama mengembangkan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengembangkan potensinya secara optimal

6.1 Analisis Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Sejak tahun 2012 tepat tanggal, 24 September 2012 telah dicanangkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Kabupaten Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Sebelum pencanangan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif baru 12 lembaga (10 SD dan 2 SMP) meningkat menjadi 142 lembaga (120 SD dan 22 SMP) dengan jumlah peserta didik mencapai 1.120 orang.

6.2 Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan Beberapa Tahun Terakhir

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 pencapaian tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan baik jumlah sekolah penyelenggara inklusif maupun jumlah peserta didik. Sampai dengan tahun 2018 jumlah

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Lombok Tengah telah mencapai 142 sekolah (122 SD dan 20 SMP) dengan jumlah peserta didik mencapai 1.120 orang siswa.

6.3 Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2018 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dalam rencana strategis Dinas Pendidikan indikator kinerja sasaran strategis ini ditargetkan 87,32% anak-anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh akses pendidikan harus terlayani sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang dimiliki. Dengan berbagai usaha dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah/lembaga non pemerintah dan masyarakat lain target tersebut dapat tercapai meskipun belum signifikan.

6.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional

Belum terdapat standar secara nasional untuk mengukur tingkat ketercapaian dan keberhasilan indikator kinerja sasaran strategis ini tetapi secara umum idealnya semua anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan akses dan layanan secara maksimal tanpa melihat latar belakang peserta didik sesuai dengan tujuan ke-4 SDGs yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

6.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang ramah anak dengan memberikan seluas-luasnya bagi Anak Berkebutuhan Khusus untuk belajar bersama teman sebayanya di sekolah reguler yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Beberapa faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah bahwa sejak awal penancangan, dukungan dan partisipasi masyarakat menunjukkan kecenderungan yang meningkat, hal ini dapat dilihat dari semakin terbukanya orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya yang memiliki kebutuhan khusus disamping adanya dukungan dan komitmen pemerintah kabupaten serta lembaga pemerintah dan non pemerintah, seperti bantuan Pemerintah Australia melalui program INOVASI dan program SETARA serta dari Yayasan Plan Indonesia melalui Yayasan Sumberdaya Lingkungan dan Pelestarian Pembangunan (YSLPP).

6.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2018 untuk mencapai target indikator kinerja sasaran strategis ini disediakan anggaran sebesar Rp. 535.460.000,00 dan terelaisasi sebesar Rp.524.452.000,00 atau 97,94% dari anggaran yang tersedia.

6.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja)

Dari ke-5 program teknis yang ada, yaitu 1).Program Pendidikan Anak Usia Dini, 2).Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 3). Program Pendidikan Non Formal, 4). Program Pendidikan Luar Biasa, 5). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pendidikan Luar Biasa (PLB) adalah program teknis yang secara langsung menunjang keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis ini.

III.4 Evaluasi Pencapaian Tujuan Strategis SKPD

Pencapaian target tujuan strategis yang dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan akumulasi dari pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penilaian internal yang telah dilakukan dan ditabulasikan kedalam skala penilaian, rata-rata pencapaian target tujuan strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis
Tahun 2018

Tujuan	Rata-rata Capaian Sasaran	Kriteria Capain Sasaran	Rata-Rata Capaian Tujuan 2018	Kriteria Capaian Tujuan 2018	Rata-Rata Capaian Tujuan 2017	Kriteria Capaian Tujuan 2017	
Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang memadai	60,72%	Kurang	85,43	Sedang	87,53	Baik
	Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memadai	100,25	Sangat Baik				
	Terwujudnya tenaga pendidik dan Kependidikan yang berkualitas	105,99	Sangat Baik				
	Terwujudnya pembelajaran bagi warga buta aksara	59,27	Kurang				
	Terwujudnya lembaga pendidikan dan kursus yang berkualitas	86,48	Baik				
	Terwujudnya pendidikan inklusi yang berkualitas	99,87	Baik				
Rata-rata Capaian Sasaran	85,43	Sedang					

III.5 Akuntabilitas Keuangan

Tabel 3.4
Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
Tahun 2018

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	%
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	483.510.000,00	1.250.561.715,00	365.399.952,54	2.099.471.667,54	1.953.877.549,00	93,07
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	168.780.000,00	0,00	168.780.000,00	150.671.234,00	89,27
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	376.555.000,00	0,00	376.555.000,00	315.750.600,00	83,85
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	399.810.000,00	77.936.250,00	0,00	477.746.250,00	468.976.250,00	98,16
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	38.095.000,00	0,00	38.095.000,00	38.095.000,00	100,00
5.	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	375.495.465,00	0,00	375.495.465,00	334.210.465,00	89,01
6.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	83.700.000,00	53.700.000,00	365.399.952,54	502.799.952,54	486.244.000,00	96,71
7.	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	79.930.000,00	99,91
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	2.430.000,00	3.971.975.872,00	3.974.405.872,00	3.732.709.450,00	93,92
1	Pembangunan gedung kantor	0,00	0,00	2.729.805.872,00	2.729.805.872,00	2.493.109.450,00	91,33
2	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	2.430.000,00	1.242.170.000,00	1.244.600.000,00	1.239.600.000,00	99,60
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	41.850.000,00	28.420.000,00	0,00	70.270.000,00	66.113.000,00	94,08
1	Penilaian Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat PNS Guru	41.850.000,00	28.420.000,00	0,00	70.270.000,00	66.113.000,00	94,08
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.735.000,00	21.440.000,00	0,00	46.175.000,00	44.675.000,00	96,75

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	%
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24.735.000,00	21.440.000,00	0,00	46.175.000,00	44.675.000,00	96,75
V	Program Pendidikan Anak Usia Dini	32.005.000,00	10.594.644.250,00	748.022.000,00	11.374.671.250,00	11.246.005.050,00	98,87
	Pembangunan gedung sekolah	0,00	3.918.080.000,00	696.742.000,00	4.614.822.000,00	4.533.675.000,00	98,24
1	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	7.075.000,00	5.509.190.000,00	0,00	5.516.265.000,00	5.508.129.000,00	99,85
2	Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	5.150.000,00	60.175.250,00	0,00	65.325.250,00	63.879.650,00	97,79
3	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	3.655.000,00	916.589.000,00	0,00	920.244.000,00	882.306.400,00	95,88
4	Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)	16.125.000,00	190.610.000,00	51.280.000,00	258.015.000,00	258.015.000,00	100,00
VI	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	13.778.955.000,00	66.001.734.600,00	42.945.792.750,00	122.726.482.350,00	122.501.210.315,00	99,82
1.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI	4.950.000,00	340.000.000,00	374.720.000,00	719.670.000,00	718.024.000,00	99,77
2.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/MI	19.070.000,00	1.376.700.000,00	16.926.946.250,00	18.322.716.250,00	18.315.029.900,00	99,96
3.	Pelatihan Penyusunan kurikulum SD/MI	1.550.000,00	142.685.000,00	0,00	144.235.000,00	144.234.799,00	100,00
4.	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SD/MI	14.875.000,00	56.459.100,00	0,00	71.334.100,00	71.325.500,00	99,99
5.	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI	5.935.000,00	539.085.000,00	0,00	545.020.000,00	542.958.400,00	99,62
6.	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	29.180.000,00	71.670.000,00	0,00	100.850.000,00	93.650.000,00	92,86
7.	Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Dasar SD/MI	1.775.000,00	668.215.000,00	0,00	669.990.000,00	669.940.500,00	99,99
8.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP/MTs	8.225.000,00	1.742.961.000,00	6.749.316.500,00	8.500.502.500,00	8.408.214.576,00	98,91
9.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP/MTs	15.075.000,00	594.212.500,00	711.850.000,00	1.321.137.500,00	1.247.533.600,00	94,43

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	%
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Pelatihan Penyusunan kurikulum SMP/MTs	5.425.000,00	330.612.000,00	8.650.000,00	344.687.000,00	336.406.100,00	97,60
11.	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SMP/MTs	10.575.000,00	51.785.000,00	0,00	62.360.000,00	59.592.400,00	95,56
12.	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP/MTs	31.250.000,00	509.600.000,00	0,00	540.850.000,00	523.096.340,00	96,72
13.	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah SMP/MTs	6.875.000,00	116.470.000,00	0,00	123.345.000,00	122.645.000,00	99,43
14.	Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Dasar SMP/MTs	32.950.000,00	413.780.000,00	64.550.000,00	511.280.000,00	501.354.200,00	98,06
15.	Pembinaan Pendidikan Karakter dan Siswa Berprestasi SMP/MTs	8.925.000,00	190.780.000,00	0,00	199.705.000,00	198.405.000,00	99,35
16.	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI	10.428.120.000,00	45.188.520.000,00	13.904.160.000,00	69.520.800.000,00	69.520.800.000,00	100,00
17.	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs	3.154.200.000,00	13.668.200.000,00	4.205.600.000,00	21.028.000.000,00	21.028.000.000,00	100,00
VII	Program Pendidikan Non Formal	2.100.000,00	1.184.900.000,00	132.500.000,00	1.319.500.000,00	1.316.714.408,00	99,79
1	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	2.100.000,00	1.184.900.000,00	132.500.000,00	1.319.500.000,00	1.316.714.408,00	99,79
VIII	Program Pendidikan Luar Biasa	13.950.000,00	521.510.000,00	0,00	535.460.000,00	524.452.000,00	97,94
1	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS	12.225.000,00	73.010.000,00	0,00	85.235.000,00	74.445.000,00	87,34
2	Pengembangan pusat sumber/guru kunjung dan guru pembina khusus pengembangan pendidikan inklusi pendidikan dasar	1.725.000,00	448.500.000,00	0,00	450.225.000,00	450.007.000,00	99,95
IX	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	31.250.000,00	4.526.429.000,00	0,00	4.557.679.000,00	4.499.257.100,00	98,72
1	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	7.750.000,00	88.625.000,00	0,00	96.375.000,00	92.281.600,00	95,75

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	%
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	775.000,00	137.920.000,00	0,00	138.695.000,00	138.431.000,00	99,81
3	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	12.750.000,00	31.440.000,00	0,00	44.190.000,00	34.960.500,00	79,11
4	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	775.000,00	129.695.000,00	0,00	130.470.000,00	130.470.000,00	100,00
5	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	675.000,00	4.037.044.000,00	0,00	4.037.719.000,00	3.994.519.000,00	98,93
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	7.750.000,00	15.855.000,00	0,00	23.605.000,00	21.970.000,00	93,07
7	Pengembangan kualitas literasi dan numerasi guru	775.000,00	85.850.000,00	0,00	86.625.000,00	86.625.000,00	100,00
X	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	211.200.000,00	710.367.500,00	16.100.000,00	937.667.500,00	808.016.352,00	86,17
1	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	72.550.000,00	75.560.000,00	0,00	148.110.000,00	143.054.000,00	96,59
2	Pembinaan Dewan Pendidikan	54.000.000,00	88.097.500,00	0,00	142.097.500,00	142.005.500,00	99,94
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3.100.000,00	30.140.000,00	0,00	33.240.000,00	33.175.000,00	99,80
4	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pendidikan	51.530.000,00	95.070.000,00	16.100.000,00	162.700.000,00	157.854.710,00	97,02
5	Pelaksanaan Tugas Pengawasan Akademik dan Manajerial pada Satuan Pendidikan	3.500.000,00	96.650.000,00	0,00	100.150.000,00	80.950.000,00	80,83
6	Dukungan operasional UPT Dinas Pendidikan	26.520.000,00	324.850.000,00	0,00	351.370.000,00	250.977.142,00	71,43
	TOTAL BELANJA LANGSUNG	14.619.555.000,00	84.842.437.065,00	48.179.790.574,54	147.641.782.639,54	146.693.030.224,00	99,36

B A B IV PENUTUP

Secara umum pencapaian keenam target indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan hasil evaluasi internal adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang memadai rata-rata pencapaiannya adalah 60,72 atau kategori sedang
2. Sasaran terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memadai, rata-rata pencapaiannya adalah 100,25 atau kategori sangat baik
3. Sasaran terwujudnya tenaga pendidik dan Kependidikan yang berkualitas rata-rata pencapaiannya adalah 105,99 atau kategori sangat baik
4. Sasaran Terwujudnya pembelajaran bagi warga buta aksara rata-rata pencapaiannya adalah 59,27 atau kategori kurang
5. Sasaran terwujudnya lembaga pendidikan dan kursus yang berkualitas rata-rata pencapaiannya adalah 86,48 atau kategori baik
6. Sasaran terwujudnya pendidikan inklusif yang berkualitas rata-rata pencapaiannya adalah 99,87 atau kategori baik

Rata-rata capaian dari keenam sasaran strategis tersebut adalah 85,43 atau kategori sedang. Sedangkan berdasarkan Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan, dari Rp. 147.641.782.639,54 pagu dana yang dijabarkan kedalam lima program teknis dan enam program generik dan 51 kegiatan, terealisasi sebesar 99,36% atau Rp. 146.693.030.224,00

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menyelesaikan kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten, Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

Praya,
KERALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. LOMBOK TENGAH



H. SUMUM, S.Pd., S.H., M.Pd
NIP. 196312311987031325